

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu

Zulaili

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Al Washliyah Medan

Zulaili123zu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial dan bersama-sama pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi asosiatif dan menggunakan analisis regresi berganda. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel bebas. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kependudukan dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Untuk uji F terlihat ketiga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (kemiskinan).

Kata kunci: *Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran*

Abstract

This research purpose to analyze the partially and together effect of population, education and unemployment on poverty in Bengkulu Province. This research is a kind of associative explanation research and using multiple regression analysis. The data from Central Buerau Statistic of Bengkulu Province. The dependent variable in this research is poverty, while the total population, education, and unemployment as the independent variable. Regression results indicate that the variables of population and education do not effect on poverty. The unemployment variables effect to the poverty. For F test seen the three independent variables collectively effect to the dependent variable (poverty).

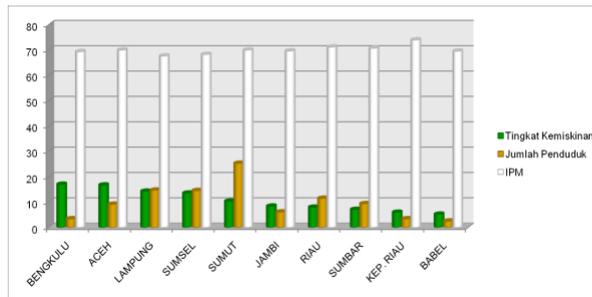
Key word: Poverty, Total population, education, and Unemployment

Pendahuluan

Negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu kemiskinan. Menurut ekonom (dalam arsyad, 2010) kemiskinan di Indonesia bersifat multi dimensional. Kemiskinan bersifat multi dimensional yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek utama berupa aset miskin, organisasi politik, dan sosial pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa jaringan sosial yang buruk, sumber keuangan

dan informasi. Jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia berbeda-beda, yang menonjol adalah jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera. Dimana masing-masing provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan antarprovinsi di Pulau Sumatera juga berbeda, berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Gambar 1 Jumlah penduduk miskin di sepuluh provinsi di pulau sumatera 2019



Sumber: BPS Sumut 2019 (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu berada pada urutan pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kebijakan melalui berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan hampir melarat.

Untuk mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin, Pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu biaya pendidikan, biaya kesehatan, bantuan langsung tunai, raskin serta infrastruktur seperti air bersih, jalan dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin pendapatan ekonomi pemerintah melakukan pelatihan, ekonomi usaha, stimulan modal kerja/usaha (koperasi perempuan), pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna. (BAPPEMAS). Namun kemiskinan masih menjadi masalah bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, seharusnya pemerintah tidak hanya melihat dari segi mikro saja dalam menekan kemiskinan tetapi harus dilihat secara makro, mulai dari kependudukan, pendidikan dan pengangguran.

Namun kemiskinan masih menjadi masalah bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, seharusnya pemerintah tidak hanya melihat dari segi mikro saja dalam menekan kemiskinan tetapi harus dilihat secara makro, mulai dari kependudukan, pendidikan dan pengangguran. Dunia pendidikan khususnya penduduk Bengkulu yang mengalami buta aksara masih menunggu cukup baik, dimana 11,98% penduduk Provinsi Bengkulu yang berusia di atas 15 tahun masih mengalami buta aksara, di era globalisasi saat ini pendidikan merupakan salah satu tonggak untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mulyadi (2008) fungsi pendidikan adalah menyiapkan salah satu input dalam proses produksi. Hal ini akan mendorong dan meningkatkan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk.

Saat ini, lahan untuk pekerjaan orang sudah banyak tergantikan oleh mesin. Menurut Sukirno (2006) penambahan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja akan menyebabkan banyak tenaga kerja tidak menyelesaikan pekerjaan. Kejadian tersebut akan menambah daftar penduduk miskin di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah (1) apakah secara parsial pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Bengkulu, (2) apakah ada pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

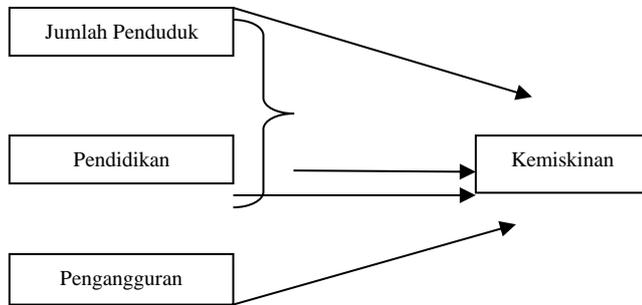
Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 1995-2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan model regresi linier berganda untuk memperkirakan pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Penduduk, pendidikan dan pengangguran pada tahun 1995-2019.

Mengacu pada dasar teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Bengkulu.

H2 : Jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka rancangan penelitian dapat digambarkan dan dibuat persamaan regresinya sebagai berikut:



Gambar.2 Desain penelitian

Berdasarkan data observasi simulasi dan hasil regresi diputuskan persamaan yang digunakan :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan :

- Y = Kemiskinan
- X1 = Jumlah Penduduk
- X2 = Pendidikan
- X3 = Pengangguran
- a = Konstanta
- b1 b2 b3 = Regresi Koefisien

HASIL PEMBAHASAN

Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Hasil perhitungan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Menurut teori Malthus (dalam skousen, 2009:85) penduduk cenderung tumbuh menurut deret ukur (geometris), sedangkan produksi pangan (sumber daya alam) cenderung tumbuh menurut deret hitungan (aritmatika). Akibat tidak efisiennya penyediaan antara sumber daya bumi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Dengan kata lain jika sumber daya pembangunan tidak dapat mendukung pembangunan kependudukan maka akan menimbulkan kemiskinan. Selanjutnya, menurut coale-hoover (dalam mulyadi, 2008) bahwa pertumbuhan penduduk sebagai perkembangan pengganggu.

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sangat besar; mereka tidak mempengaruhi sejumlah besar penduduk miskin yang ada di provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) tampak dari hasil SP2000, sehingga sebaran penduduk lebih didominasi oleh usia produktif atau penduduk usia yang berbentuk piramida seperti gentong terbalik. Bentuk piramida penduduk hasil sensus penduduk 2010 tidak jauh berbeda dengan sensus penduduk 2000, menggelembungkan jumlah penduduk tetapi sedikit bergeser ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa median umur provinsi Bengkulu hasil sensus penduduk 2010 lebih tua dari sensus penduduk 2000.

Penduduk usia produktif yang mendominasi tidak akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, karena pada usia produktif peluang kerja untuk peningkatan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar.

Pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Pendidikan dalam penelitian ini difokuskan pada penduduk yang mengalami buta aksara. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya dan teori penelitian sebelumnya yang menjadi teori dalam penelitian. Menurut Todaro (2006:434) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Selanjutnya menurut Bank Dunia (2013) (dalam nirwana, 2013) pendidikan merupakan salah satu instrumen paling ampuh untuk mengurangi kemiskinan.

Pendidikan yang dititikberatkan pada Angka Buta Huruf (ABH) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang buta huruf berusia relatif tua yang pada masa mudanya tidak berpendidikan, dan paling banyak terjadi di daerah pedesaan. Dari 72,31 persen penduduk provinsi Bengkulu berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf adalah perempuan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) erat kaitannya dengan tingkat pendidikan atau semakin tinggi jenjang pendidikan yang pada akhirnya akan semakin tinggi TPAK. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sampai akhir, peluang sebagai tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja semakin siap dan peluang untuk mendapatkan jabatan tertentu di dunia usaha semakin terbuka. Padahal, data menunjukkan tentang sensus penduduk 2019 menunjukkan bahwa TPAK pedesaan lebih tinggi dari tingkat pendidikan TPAK perkotaan secara keseluruhan. Di sebabkan pekerjaan di pedesaan primer di sektor pertanian dan informal tidak memerlukan pendidikan khusus. Hal ini dapat dilihat persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi dan jenis daerah di Provinsi Bengkulu tahun 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Persentase angkatan kerja menurut Pendidikan tertinggi dan jenis daerah di provinsi Bengkulu tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Perkotaan	Pedesaan
Tidak Sekolah	6,10	18,59
Tidak Tamat SD	5,23	8,54
SD	27,32	41,18
SLTP	21,78	18,42
SLTA	30,59	11,10
D1/D2/D3	2,31	0,76
D4/S1/S2/S3	6,67	1,42

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2019 (data diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak hanya dilihat dari sektor regional, dari sektor seks TPAK memiliki perbedaan. TPAK perempuan cenderung lebih

rendah dibandingkan TPAK laki-laki pada semua kelompok umur secara proporsional antara 82,35 persen dengan 52,61 persen.

Hal ini disebabkan banyaknya perempuan yang memilih sebagai kelompok daripada tenaga kerja antara lain menjadi ibu rumah tangga, yang banyak dijumpai di negara berkembang. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja atau memilih untuk mengurus rumah tangga, terutama ketika memasuki masa perkawinan, melahirkan dan mengasuh anak. Disisi lain diperkirakan lapangan kerja di Provinsi Bengkulu masih banyak didominasi oleh laki-laki.

Karena banyaknya perempuan yang memilih untuk tidak menjadi angkatan kerja, menunjukkan kemampuan ekonomi berarti keluarga sudah pasti dengan mengandalkan pendapatan dari kepala keluarga saja. Dengan demikian, khususnya rendahnya pendidikan yang diterima perempuan tidak berdampak pada kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, dan mengakibatkan tidak adanya pendapatan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan semakin terpuruk. Menurunnya kesejahteraan karena menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2010:359) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran, dengan besarnya kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pemerataan.

Tingginya angka pengangguran berpotensi mengurangi peluang ekonomi dalam peningkatan produktivitas daerah, dan mencerminkan semakin besarnya beban sosial masyarakat. Dengan demikian, masyarakat secara perlahan akan mendorong kelompok penduduk miskin.

Penelitian Permana dan Arianti (2012) juga menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemiskinan. Pedoman yang dijadikan acuan menurut pendapat Sukirno (2004) yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan yang dicapai seseorang.

Banyak studi empiris menunjukkan bahwa sumber utama kemiskinan adalah pengangguran.

Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan memperbesar peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan. Ketika pengangguran di suatu daerah sangat buruk kekacauan politik dan sosial, selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Berbeda dengan penelitian Amalia (2012) bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingginya tingkat pendapatan keluarga sehingga mampu menopang biaya hidup untuk pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidangnya serta tingkat pendapatan yang diinginkan saja. , dan tidak mau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan.

Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu digunakan uji F. Hasil uji F menunjukkan ada pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berbagai upaya program terjadi distorsi salah satunya pembangunan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks; terjadinya kemiskinan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran.

Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi yang besar. Menurut Smith pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penduduk dilihat dari sisi lapangan kerja merupakan penawaran bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Jika pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia tidak mendapat perhatian dari pemerintah, dapat mengakibatkan laju

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Hal ini dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran dan menambah jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan kualitas pendidikan yang memadai, untuk menciptakan sumber daya yang nyata berkualitas. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peran Pemerintah terutama dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Menurut Todaro (2006) pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kualitas intelektual, akhlak, moral, moral dan fisik. Realitasnya dapat dilihat dengan berinvestasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat bersaing dalam persaingan internasional yang semakin ketat.

Pada saat persaingan pekerjaan yang semakin ketat maka indikator utama yang terlihat adalah pengalaman dan pendidikan. Ketika prioritas utama adalah pendidikan dan mutu pendidikan tidak sesuai dengan permintaan kerja yang diharapkan maka jumlah permintaan yang terjadi maka pekerjaan berkurang, sehingga pengangguran semakin banyak. Tidak hanya faktor pendidikan, pengangguran terjadi karena pola pikir sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan harus di instansi pemerintah atau perusahaan, sedangkan pada sektor lini kedua kesempatan kerja yang tersedia masih sangat terbatas.

Banyaknya pengangguran akan mempengaruhi pembangunan. Tingkat pengangguran dapat menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan, yang sangat berpengaruh dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengacu pada

pendapat arsyad (2010) ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran sekali, luasnya kemiskinan, distribusi pendapatan dan tidak merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu lebih didominasi oleh usia produktif, sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. masih terbuka lebar.

Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, karena rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang buta huruf berusia relatif tua yang pada masa mudanya tidak berpendidikan, dan paling banyak terjadi di pedesaan. Seorang penduduk Provinsi Bengkulu berusia di atas 15 tahun yang mengalami buta huruf rata-rata adalah perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan. Artinya ketika pengangguran tinggi maka kemiskinan juga tinggi.

Penduduk, pendidikan, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka semakin tinggi produktivitas tenaga kerja dapat mengurangi kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk mengurangi penduduk miskin adalah melalui Dinas Pertanian mengulang kembali kejayaan sektor pertanian (sektor informal) yang swasembada pangan, maka alangkah baiknya jika pengolahan , pemberdayaan, dan pelatihan secara turun temurun tanpa memudahkan petani dalam mendapatkan segala kebutuhannya.

Melalui Dinas Koperasi dan UKM. Koperasi dan UMKM (sektor informal) merupakan usaha mandiri yang sudah terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan berkontribusi terhadap perekonomian negara. Untuk mengembalikan kedudukan koperasi pada tempatnya dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

koperasi maka perlu adanya filter dalam pendirian koperasi dan UMKM dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah oleh Pemerintah atau melalui usaha koperasi yang dijalankan melalui kooperatif.

BKKBN lebih memperhatikan laju pertumbuhan penduduk di desa, karena angka kelahiran di desa lebih besar daripada di kota, sehingga fokus utama ground breaking KB lebih baik dilakukan di desa. Misalnya memberikan tanggung jawab kepada bidan desa menjadi duta keluarga berencana, sehingga bidan dapat memberikan pelayanan desa dan menjadi konsultan bagi masyarakat awam yang belum mengenal keluarga berencana (KB).

Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada pendidikan formal, karena pendidikan nonformal juga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif sehingga bantuan pemerintah yang diberikan harus sebagian digunakan untuk pengembangan non pendidikan, seperti mendirikan tempat terbuka untuk umum yang bermanfaat. pelatihan kreativitas (menjahit, mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif sehingga bantuan Pemerintah yang diberikan harus sebagian digunakan untuk pengembangan pendidikan nonformal, seperti mendirikan tempat terbuka untuk umum pelatihan kreativitas yang bermanfaat khususnya bagi anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, Fitri. 2012. *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur (ITC) 2001-2010*.
- [2] Arsyad, Lincoln. 2010. *Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [3] The Central Bureau of statistics. 2008. *analysis of Drafting Macro-Economic Performance of Bengkulu Province the year 2008*. North Sumatera, Indonesia: BPS.
- [4] -----, 2007. *Analysis socio-economic indicators of Bengkulu province 2003-2007*. North Sumatera, Indonesia: BPS.
- [5] -----, 2011. *the Population into a new Era of Bengkulu Province*. North Sumatera, Indonesia: BPS.

- [6] BAPEMAS. 2013. The empowerment Program villages.
- [7] BPS. 2019. The poverty. (http://bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subject=23, accessed September 02, 2017).
- [8] The Department of national education (2003): the ACT Number 20 year 2003 About Sisdiknas, Jakarta.
- [9] The MONETARY DEPARTMENT. 2015. Review of economic and financial area (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/257/13.%20bengkulu%province%.pdf>, accessed 08 september 2017).
- [10] Ihsan, Fuad. 2008. Basic Educational Components MKDK. Jakarta: PT Rineka Copyright.
- [11] Irawan and Suparmoko. 2002. the Economics of development. The Fifth Edition. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- [12] Lipsey, Richard G et al. 2001. Introduction to macro-economics. The Eighth Edition Of Erlangga, Jakarta.
- [13] Mulyadi. 2008. The Economics of human resources in a perspective of development. Jakarta: Eagle Press.
- [14] Mustika, Chandra. 2011. The influence GDP and population on poverty rate in indonesia 1990-2008. Journal of Economic (online) paradigm (<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/paradigma/article/view/57/46>, accessed 10 september 2017).
- [15] Nirvana, a beautiful goddess. 2013. The influence of the educational on the percentage of the poor population (study on the 33 provinces in Indonesia, 6 provinces in Java Island, and 27 provinces outside Java In 2006-2011). Scientific Journals (Online). Accessed 10 september 2017).
- [16] Solanki, Anggit Yoga and Bisby, Fitri. 2012. The analysis of the influence of GDP, unemployment, education, and health Against poverty in Central Java the year 2004-2009. Diponegoro Journal Of Economics (Online) vol. 1, no. 1, (<http://eprints.undip.ac.id/36162/>, accessed september 10, 2017).
- [17] Anthony. 2010. Evaluation of the results of the study. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [18] Rahaju Siti. DKK. 2004. Reflections of education today. Surabaya: University Press UNESA.

- [19] Among Sukirno. 2006. Introduction to the theory of macro-economy. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [20] Said, Rusli. 2001. Introduction to the science of Demography. Jakarta: research institutions and economic and social development.
- [21] Skousen, Mark. 2009. The history of economic thought the Maestro. Jakarta: Prenada.
- [22] Sukirno, among others. 2004. Introduction to theory of Macroeconomics. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- [23] Todaro, michael p. 2006. Economic development. Jakarta: eason.
- [24] Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. The analysis of the influence on GDP, Unemployment and education on poverty in district, municipality 2005-2008 in bengkulu province.